

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. Pertama, pada bagian latar belakang akan dibahas mengenai alasan peneliti memilih penelitian ini yang akan diteliti. Kedua, pada perumusan masalah dikemukakan beberapa masalah yang muncul dalam penelitian ini dan masalah tersebut yang akan diteliti. Ketiga, pada bab ini juga akan dikemukakan tujuan dan manfaat dari diadakannya penelitian ini. Terakhir, bab ini akan menjelaskan sistematika dari penulisan penelitian ini secara berurutan.

### **1.1. Latar Belakang**

Krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia pada awal masa Orde Baru, yaitu sekitar tahun 1998, merupakan salah satu kekhawatiran di dalam perekonomian di Indonesia. Krisis yang terjadi pada masa itu akhirnya mendesak para pembuat dan pengambil keputusan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang mampu memperbaiki kondisi maupun kinerja perekonomian di Indonesia yang sempat memburuk. Para pembuat keputusan pun memutuskan untuk melaksanakan sebuah sistem yang sekiranya dapat membawa perbaikan ekonomi Indonesia, yaitu salah satunya dengan melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal.

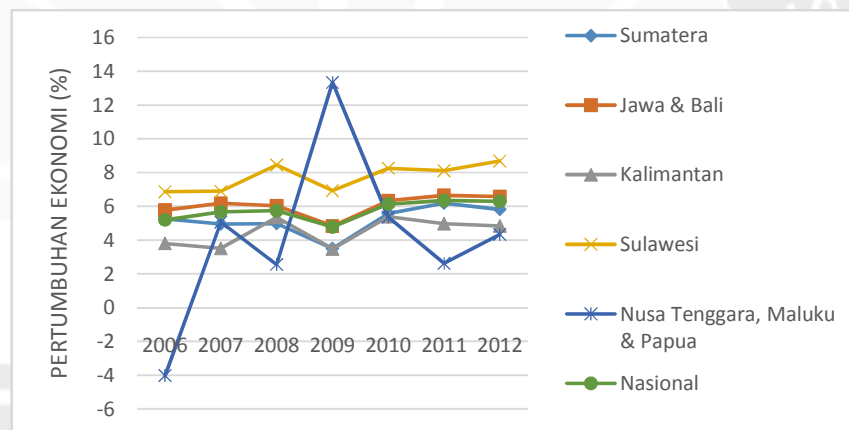
Berdasarkan UU No.22/1999 yang selanjutnya mengalami pembaharuan menjadi UU No.32/2004 mengenai pemerintahan daerah mengatur pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri (otonomi daerah). Pada UU No. 25/1999 yang juga mengalami pembaharuan menjadi UU No. 33/2004 tentang Desentralisasi Fiskal mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai konsekuensi otonomi daerah, dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function* (Amir, 2012:16).

Pelaksanaan kebijakan ini memiliki beberapa tujuan pokok, antara lain menghilangkan terjadinya kesenjangan (*imbalance*) yang ada baik kesenjangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun kesenjangan horizontal (*horizontal imbalanced*) yang terjadi antar daerah. Selain itu desentralisasi fiskal sebenarnya memiliki tujuan akhir untuk menciptakan demokratisasi di Indonesia sehingga kekuasaan tidak hanya terpusat di Indonesia (Amir, 2012:16).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal juga pada dasarnya merupakan sebuah instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Instrumen ini digunakan agar kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih mudah tercapai. Oleh karena itu otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan dengan menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah.

Tujuannya adalah untuk dapat membuat kebijakan fiskal daerah akan benar-benar sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas daerah.

Salah satu hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal adalah kesejahteraan masyarakat di Indonesia menjadi lebih mudah dicapai. Salah satu indikator yang paling sederhana untuk melihatnya adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut akan semakin meningkat atau bisa dikatakan semakin membaik.

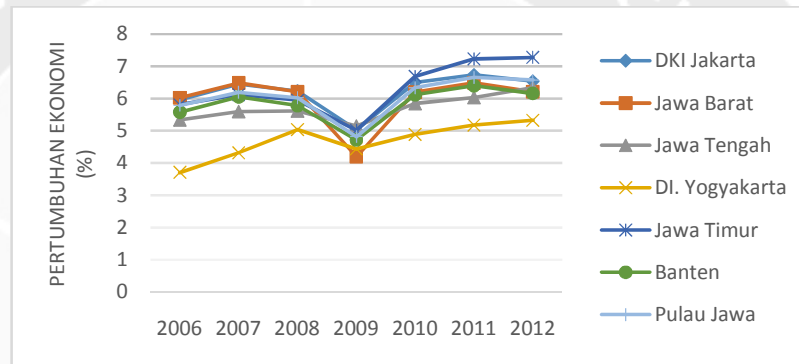


**Gambar1.1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2006-2012**

Sumber : BPS Nasional, diolah (2013).

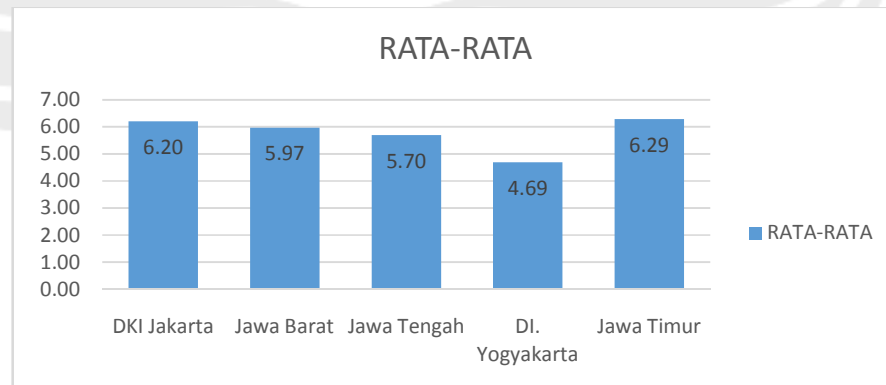
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator melihat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dari Gambar 1.1 dapat terlihat selama tahun 2006-2012 bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Selain itu di kedua wilayah ini laju pertumbuhan rata-ratanya cukup baik, yaitu berada tidak

terlalu jauh dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Gambar 1.1 dapat terlihat bahwa provinsi yang memiliki laju pertumbuhan yang tidak stabil adalah untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Ketika tahun 2006, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini bahkan berada pada nilai -4,03 dan untuk tahun 2009 pertumbuhan ekonominya meningkat sangat drastis, yaitu berada pada kisaran 13,03.



**Gambar1.2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006– 2012**

Sumber : BPS Nasional, diolah (2013).



**Gambar 1.3 : Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2012**

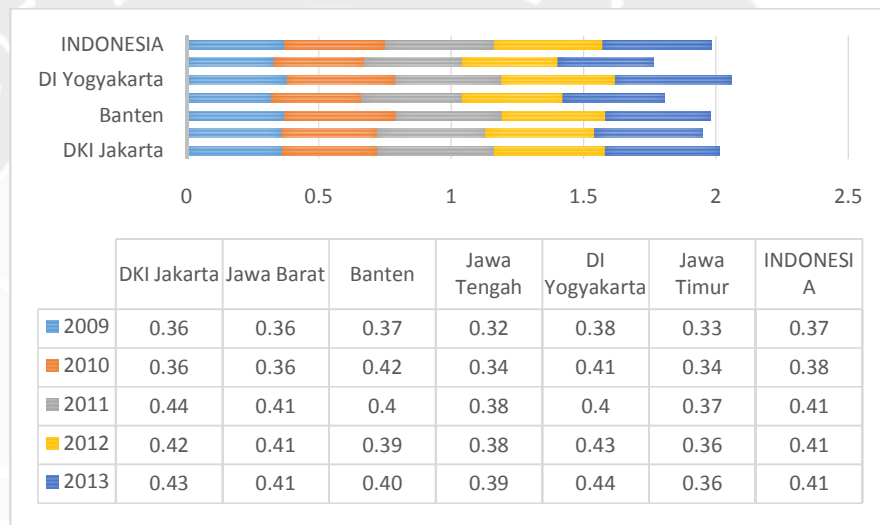
Sumber : BPS Nasional, diolah (2013).

Pada Gambar 1.2 menggambarkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Grafik tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, ketika pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada Gambar 1.2 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang rendah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketika laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu daerah maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut akan semakin meningkat. Indikator kesejahteraan masyarakat bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, indikator lain yang dapat dipergunakan adalah tingkat distribusi pendapatan antarwilayah yang sering dikenal dengan ketimpangan pendapatan antarwilayah. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi terjadi *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan antar wilayah. Hal ini terjadi pada beberapa negara yang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menunjukkan bahwa seakan-akan terdapat korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan ekonomi. Korelasi positif tersebut menggambarkan ketika suatu wilayah memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut akan semakin meningkat (Tambunan, 2011:183).

Pada Gambar 1.4 menjelaskan mengenai perkembangan tingkat ketimpangan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa provinsi yang memiliki peningkatan laju pertumbuhan ekonomi

juga mengalami peningkatan Indeks Gini. Artinya, ketimpangan ekonomi antarwilayah yang terjadi pada setiap provinsi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga dapat didefinisikan bahwa pada setiap provinsi di Pulau Jawa terjadi *gap* yang cukup lebar antara penduduk yang kaya dan penduduk yang miskin.



**Gambar 1.4 : Indeks Gini Indonesia dan Provinsi yang Ada di Pulau Jawa Tahun 2009 - 2013**

Sumber : BPS Nasional, diolah (2013).

Pada Gambar 1.3 dapat terlihat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kinerja laju pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya meskipun laju pertumbuhannya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki indeks gini yang tinggi bahkan jika dibandingkan dengan nilai indeks gini nasional. Ini berarti ketimpangan ekonomi yang terjadi di provinsi ini cukup mengkhawatirkan. Hal ini berarti terjadi korelasi yang positif antara

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

- 1) Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- 2) Bagaimana hipotesis Kuznet berbentuk kurva U terbalik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh dari desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- 2) Untuk mengetahui berlaku atau tidak berlakunya hipotesis Kuznet berbentuk kurva U terbalik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh :

- 1) Pemerintah, sebagai salah satu sumber informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan menyangkut pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah serta pengurangan ketimpangan yang terjadi di wilayah agar menjadi lebih merata.
- 2) Pembaca, sebagai salah satu bahan referensi dan pembanding studi untuk penelitian yang terkait dengan riset ini.
- 3) Peneliti sendiri, sebagai salah satu sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dan sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti.

#### **1.5. Hipotesis**

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti dapat membentuk beberapa hipotesis awal yang nantinya akan dibuktikan di dalam penelitian ini. Hipotesis tersebut antara lain adalah sebagai berikut ini :



Hipotesis 1 : Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hipotesis 2 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hipotesis 3 : Pertumbuhan ekonomi dan derajat desentralisasi fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini akan terdapat sistematika penelitian yang terdiri dari beberapa bab dengan perinciannya sebagai berikut ini :

##### **Bab I   Pendahuluan**

Pada pendahuluan akan dikemukakan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa grafik berdasarkan data yang mendukung dalam pembuatan yang diperoleh dari BPS Nasional.

##### **Bab II   Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini akan diberikan penjelasan teori-teori yang akan digunakan di dalam penelitian ini dan beberapa teori dan studi empiris yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. Di dalam bagian ini juga akan dibahas

mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal dan ketimpangan wilayah pada suatu daerah.

### **Bab III Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian akan dibahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan digunakan untuk penelitian ini.

### **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Dalam hasil dan pembahasan akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian itu adalah mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya di dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota dan faktor yang menjadi penyebab ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terakhir, bab ini akan menjelaskan mengenai hasil pembuktian hipotesis Kuznet mengenai kurva U yang terbalik apakah berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu di dalam bab ini akan dipaparkan beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul.

